

PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEEROM DI TANAH PAPUA

Oleh. Sr. Viani, SSpS*

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG



Papua adalah tanah yang penuh paradoks, ironi dan kontradiksi. Eksploitasi kekayaan alamnya telah menghasilkan keuntungan tak terhitung bagi perusahaan – perusahaan nasional dan transnasional, serta memberikan kontribusi luar biasa bagi pembangunan Negara, tetapi tidak sedikit rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Kota – kota provinsi dan kabupaten berkembang pesat seiring dengan laju pembangunan ekonomi, tetapi orang asli Papua jarang terlihat di pusat – pusat kemajuan itu. Bandara, pelabuhan laut, universitas, rumah sakitnya

dibangun tak kalah secara fisik dari daerah lain, tetapi kecil persentase orang asli Papua yang memakai sarana – sarana tersebut, atau bekerja di sana. Kosmologi dan kearifan hidup berbagai suku di Papua mencerminkan keadaban tingkat tinggi, tetapi oleh kebanyakan orang mereka dianggap primitif dan terkebelakang. Paradoks ini amat panjang, kalau kita telisik dengan sungguh – sungguh kompleksitas persoalan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Papua hingga hari ini.

Secara visual aneka paradoks yang mengakibatkan penderitaan kolektif itu tergambarkan dalam monumen yang sampai hari ini berdiri tegak di tengah kota Jayapura (Port Numbay) itu, orang Asli Papua – laki-laki dan perempuan – ditampilkan dengan pakaian adat mereka, memikul cawan emas raksasa, yang atasnya berdiri kokoh seorang tentara, memanggul Bendera Merah Putih dan memegang senjata otomatis.

Monumen itu, baik sebagai “benda seni” maupun sebagai representasi wacana dominan, memicu permenungan yang panjang.

- Indonesia-kah yang di atas itu? Aparat keamanan TNI dan POLRI-kah? Atau elit Papua yang menegakkan kedaulatan NKRI di Papua?
- Papuakah yang di bawah itu? Orang Asli Papua atau semua penduduk di Tanah Papua?
- Mengapa yang diatas dipatungkan secara lebih besar, sementara yang di bawah kecil? Apa maksud dan makna dari pembedaan seperti ini?
- Mengapa orang Papua memikul emas. Dan bukan duduk di atasnya? Lihatlah, bahkan emas itu pun tidak mereka sentuh, karena emas itu diletakkan di atas bambu yang mereka potong.
- Beginikah cara Sang Saka Merah Putih ditegakkan di Papua? Inikah persatuan Indonesia? Inikah kemanusiaan yang adil dan beradab?
- Untuk apa senjata itu? Untuk mengamankan emas, atau untuk menertibkan orang – orang yang ada di bawah itu, agar tunduk, taat dan patuh?
- Apa yang terjadi jika orang – orang yang di bawah sepakat untuk melepaskan emas, orang, bendera dan senjata yang di atas? Bagaimana kalau salah satu dari mereka naik ke atas dan merampas senjata itu?

- Tidak adakah cara lain untuk menggambarkan hubungan orang Papua dengan Negara Indonesia? Misalkan mereka duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi atau berat sama dipikul ringan sama dijinjing?
- Bagaimana keterkaitan antara unsur ras (atau etnis), agama, gender, kelas dalam relasi kekuasaan yang tergambar dalam monumen itu? Apakah patung ini mencerminkan rasisme, tegangan antar agama, diskriminasi gender, dan penidasan kelas?
- Apakah yang ada dalam hati pikiran orang Asli Papua ketika melintas dan menyaksikan monumen ini? Bagaimanakah perasaan penduduk non-Asli Papua? Bagaimana pula perasaan pejabat – pejabat daerah di Papua? Juga, apa pikiran elite politik Indonesia tentang monumen ini?
- Mengapa dan untuk apa monumen semacam ini dibangun? Mengapa pula dibiarkan hingga kini?

Sudah sekitar setengah abad Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kendati banyak elemen masyarakat Papua mempertanyakan keabsahan proses integrasinya, serta mempersoalkan pengabaian hak mereka untuk menentukan nasib sendiri (*the right for self-determination*), kenyataan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia telah berlangsung selama lima puluh tahun.

Berhasilkah Indonesia mencapai tujuan hakikinya, membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di Papua? Adakah Pancasila dan undang-undang dasar 1945 telah diwujudkan di tanah Papua? Sila kelima Pancasila, misalnya menyebutkan “Keadilan Sosial bagi SELURUH Rakyat Indonesia”. Sementara itu UUD 1945 menegaskan cita-cita dan tujuan negara adalah

“...membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi SEGENAP bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan UMUM, MENCERDASKAN kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan KEADILAN SOSIAL” (Pembukaan UUD’45).

Adakah itu semua telah terjadi di Papua?

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembangunan yang menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya .

Deklarasi PBB tentang hak atas pembangunan (UNGA res.41/128, 4 Desember 1986) mendefinisikan pembangunan sebagai “proses ekonomi, sosial, kultural, dan politik yang menyeluruh, yang bertujuan untuk memperbaiki secara konstan kemaslahatan segenap warga dan semua orang, lewat peran serta yang aktif, bebas, dan penuh makna di dalam pembangunan dan dalam distribusi yang adil atas hasil-hasilnya” (Mukadimah). Ditegaskan pula bahwa pembangunan seperti itu adalah hak (*entitlement*), di mana setiap orang dan semua bangsa (*peoples*) adalah pemangku hak (*rights holder*) dan negara, baik masing-masing maupun bersama, merupakan pengemban tanggung jawab (*duty bearer*).

Sayangnya, proses pembangunan yang demikian tidak sungguh-sungguh terjadi di Papua. Ini bukan rahasia. Bukan pula kritik tanpa dasar. Pemerintah Indonesia secara legal dan terbuka mengakui kegagalannya di Papua pada mukadimah Undang-undang No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-undang itu menyebutkan

“...bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua” (poin h).

Untuk memperbaiki kesalahan Negara itu, dilahirkanlah kebijakan khusus yang diteguhkan dalam Undang – Undang Otonomi Khusus Papua. Semangat dasar dari otonomi khusus ini bukan saja “perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak – hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga Negara” (poin i), tetapi juga “meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk Asli Papua” (poin h).

B. PERUMUSAN MASALAH

Otonomi Khusus merupakan wujud dari komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial di Papua. Setelah satu dekade dilaksanakan Otonomi Khusus, pertanyaan dilontarkan:

1. Sudahkah Keadilan Sosial itu terwujud di Papua?

2. Adakah hak atas pembangunan, baik hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan maupun hak untuk menikmati hasil pembangunan secara adil, telah terwujud?
3. Bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam wujud penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan orang setempat berjalan?

Tulisan ini akan berfokus tentang akses pendidikan di Kabupaten Keerom, berhubung dengan latar belakang penulis yang pernah tinggal di Kabupaten Keerom sebagai seorang Guru di SMP Negeri 1 Waris dan SMA Negeri 3 Waris.

Dengan data – data yang ada akan dibandingkan dengan realitas yang dialami penulis di lapangan.

BAB II KABUPATEN KEEROM

1. SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN KEEROM

Dari beberapa catatan sejarah yang ada, dikisahkan bahwa di sekitar Tahun 1909, Pemerintah Belanda menugaskan salah seorang Marine Belanda bernama C. Ruhl untuk melaksanakan tugas survey batas-batas wilayah antara wilayah Nieuw Guinea Jerman. Dalam tugasnya beliau didukung oleh pasukan Tentara Belanda di bawah pimpinan kapiten komandan R.J. Sachse dan Letnan Scheffer yang mendirikan Bivaknya di Hollandia pada 28 September 1909. Dalam tugas yang dilaksanakan, mereka melalui alur sungai atau kali Tami dan rute-rute darat seperti pegunungan Mokofiang yang kemudian banyak bertemu dengan penduduk pribumi di wilayah Keerom.

Antara tahun 1912 hingga hampir berakhirnya masa pemerintahan Belanda, wilayah Keerom lebih banyak diperhatikan dari kalangan Misionaris Katolik. Nama-nama seperti J.A.Westerval, P.J. Vanderwal, A.F. Avis, A.O. Frohwein, J-M. Swart, N. Hali, W.Philipsen, R.H Pietsters, J-G Kramps, Mr. Drs. Gerretsen, H.P.B. Woolrabe, J. Hoogland dan P. Frankeolen adalah Misionaris-misionaris Belanda yang dengan setia melayani wilayah ini sebagai pelaksana misi iman Katolik dan melakukan aktivitas sosial lainnya.

Di masa pemerintahan Belanda sebagaimana yang diatur dalam Besluit Bewindsregelling Nieuw Guinea, wilayah Keerom disebut sebagai Onderafdeeling Keerom yang ada di bawah Pemerintahan afdeeling Hollandia, suatu Onderafdeeling terbagi dalam beberapa Distrik yang dikepalai oleh seseorang Districthoof atau Bestuur.

Di tahun 1940, untuk pertama kalinya Pos Pemerintah/District didirikan di Yamas yang dipimpin oleh Bestuur Yakob Tabu. Pada tahun 1942 Pos tersebut dipindahkan ke Wembi dan seterusnya dipindahkan ke Arso pada tahun 1944. Di tahun 1942 juga dibuka district baru di wilayah Waris di bawah pimpinan Bestuur Ohee. Dari 1943 hingga tahun 1959 Bestuur D. Demonggreng mengepalai Pos Pemerintahan di Desa Yafi (Yabanda).

Pada tahun 1959, Pos pemerintahan yang semula berkedudukan di Desa Yafi (Yabanda) dipindahkan ke Oebroeb (Web) dan merubah statusnya menjadi Pemerintahan Onderafdeeling Keerom yang dikepalai oleh Hoofd van Plaatselijk (HPB) Keerom, Bestuur Mr. Lind (Kepala Pemerintahan setempat). Sejak 1 Juni 1950, Nederland Nieuw Guinea yang semula berstatus Neolandschap diubah menjadi Zelfbestuurend Landschap. Setelah integrasi, pada tahun 1963-1966 Kepala Pemerintah setempat (KPS) Keerom yang dikepalai oleh Azer Demotokai berkedudukan di Ubrub, kemudian pada tahun 1966-1968 KPS Ubrub dikepalai oleh Alberth Sitorus hingga 1974.

Pada tahun 1974 wilayah Keerom terbagi menjadi empat kecamatan yaitu Web, Sengi, Waris dan Arso. Pada tahun 1968 di wilayah Keerom dibentuk wilayah Pembantu Bupati. di tahun 1991 wilayah Pembantu Bupati Keerom dirubah menjadi Badan Koordinasi Pemerintah (Bakorpen) Wilayah Keerom yang dipimpin oleh Drs. Billy Jamlean. Hingga kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tanggal 11 November 2002 wilayah Bakorpen Keerom dibentuk menjadi suatu wilayah kabupaten baru dengan nama Kabupaten Keerom.

Kabupaten Keerom menjadi salah satu Kabupaten yang baru dibentuk tahun 2002, diresmikan pada tanggal 12 April 2003 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Jayapura, yang wilayahnya terdiri dari 5 (lima) distrik yaitu : Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Waris, Distrik Senggi dan Distrik Web; memiliki 48 kampung.

Namun mulai tanggal 24 Oktober 2007 Kabupaten Keerom mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) distrik yaitu : Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Waris, Distrik Senggi, Distrik Web, Distrik Arso Timur dan Distrik Towe.

Keerom dalam pemahaman yang harfiah dimengerti sebagai ungkapan: “*Mari ke sini kita pergi akan kembali*”. Ungkapan ini dikemukakan oleh seorang Misionaris Belanda bernama P. Frankenmolen pada tahun 1939 yang pada waktu itu bersama dengan masyarakat asli setempat akan pergi ke suatu tempat dengan tujuan tertentu.

Setibanya di Kali atau Sungai Paai, tiba-tiba terjadilah banjir besar sehingga mereka tidak dapat menyeberang sehingga diputuskan untuk kembali ke tempat tinggal yang semula. P. Frankenmolen memanggil masyarakat dengan kata **Keer Omh**, yang artinya “*kembali pulang ke rumah*”.

2. VISI DAN MISI KABUPATEN KEEROM

VISI

Membangun Keerom dalam kebersamaan menuju masyarakat yang damai, maju, mandiri dan sejahtera

MISI

1. Mewujudkan pembangunan Kabupaten Keerom yang adil, aman, damai dan demokratis.
2. Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang tanggap, cepat, murah dan berkualitas.
3. Perbaikan dan percepatan jaringan infrastruktur, baik secara kualitas maupun kuantitas, guna menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan fungsi penataan ruang.
4. Peningkatan pertumbuhan sektor produksi bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah.
5. Percepatan pertumbuhan iklim investasi di daerah dengan memberikan kemudahan dan penyertaan modal masyarakat.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan adat dan kearifan lokal dalam rangka menjaga eksistensi orang Keerom dan mitra pembangunannya.

7. Penataan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dalam rangka optimalisasi pelayanan birokrasi dan pelayanan publik yang cepat dan tepat kepada masyarakat.
8. Peningkatan kapasitas fungsi pengelolaan kawasan perbatasan antar negara.

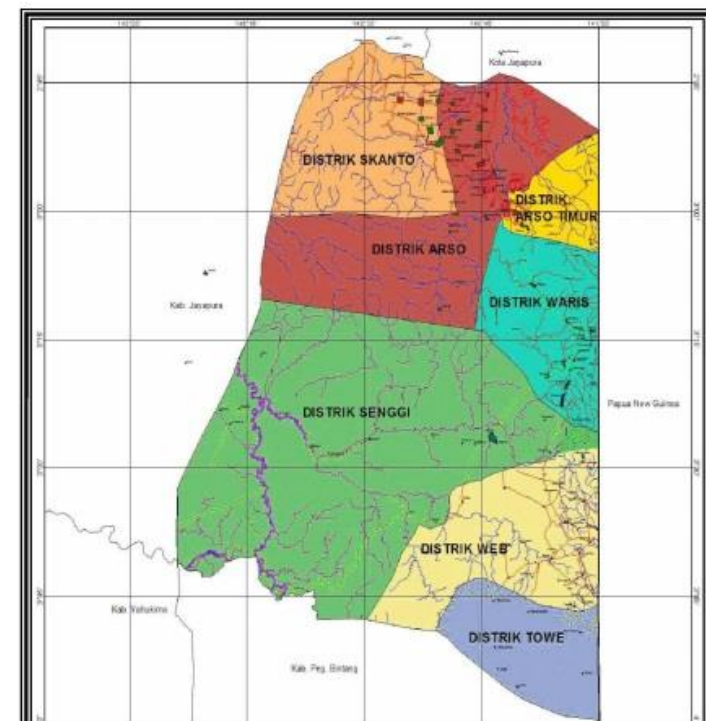
3. ARTI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH KABUPATEN KEEROM



- Bentuk Perisai Segi lima (5), melambangkan Falsafah hidup bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan mengungkapkan sifat ksatria, ketahanan dan kewaspadaan seluruh masyarakat dalam mengupayakan terwujudnya cita-cita luhur yang diharapkan.
- Garis tepi atau konter tepi berwarna merah mengandung pengertian satu tekad dan keberanian menjaga dan mempertahankan keutuhan daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan jati diri masyarakat Keerom.
- Buah Padi 17 (tujuh belas) butir melambangkan tanggal 17 (tujuh belas) Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Buah Kapas berjumlah 8 (delapan) kelopak melambangkan bulan ke delapan pada tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik 1945.
- Gunung: melambangkan tempat tersimpannya sumber daya alam.
- Tugu: melambangkan letak Kabupaten Keerom yang berada pada batas Negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea (PNG).

- Fondasi yang terdiri dari Terap-terapan bersusun tiga (3) warna putih dan merah bata: melambangkan keterpaduan antara Agama, Pemerintah dan Masyarakat. Pada Fondasi tersebut terdiri dari 12 (dua belas) kotak-kotak merah, dan empat 4 (empat) kotak-kotak putih yang mengandung makna Tanggal 12 (dua belas) dan Bulan April, yaitu Tanggal dan Bulan terbentuknya Kabupaten Keerom.
- 2 (dua) Alat tiup atau trompet Kayu melambangkan benda budaya tradisonal buatan masyarakat Keerom yang dimaknai sebagai suatu keterpaduan masyarakat asli (pribumi) dan masyarakat pendatang yang menetap dan ikut menjadi bagian dari masyarakat Keerom.
- Tulisan Kabupaten Keerom dan Motto atau semboyan yang ditulis berlatar belakang warna kuning emas melambangkan terbentuknya Kabupaten Keerom didasarkan pada maksud yang luhur dan mulia.
- Kalimat Motto atau Semboyan *Tamne Yisan Kefase* mengandung arti “*Mari Kita Bersatu Bersepakat untuk Membangun*”.

4. KEADAAN GEOGRAFIS KABUPATEN KEEROM



Peta Kabupaten Keerom

Tata letak Kabupaten Keerom secara geografis berbatasan langsung dan berada memanjang di daerah perbatasan Republik Indonesia dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Wilayah Kabupaten Keerom terletak di paling ujung timur bagian utara Provinsi Papua, yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea sehingga memiliki peran yang sangat penting dan strategis terhadap ketahanan nasional NKRI. Oleh karena itu Kabupaten Keerom merupakan salah satu wilayah Daerah Pengaman (*Security Belt*) sebagai penyangga dan pintu gerbang lalu lintas pergaulan Internasional dengan negara tetangga.

Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa kemajuan pembangunan di Kabupaten Keerom dapat memberikan nilai positif terhadap citra pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap PNG. Kabupaten Keerom memiliki batas – batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Jayapura.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG).

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Keerom terdiri dari 5 distrik dan 48 kampung. Dalam perjalanannya Kabupaten Keerom telah memekarkan 5 distrik tersebut menjadi 7 distrik sesuai Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik Arso Timur dan Distrik Towe. Jadi secara administratif Kabupaten Keerom terdiri dari 7 distrik dan 61 kampung. Persentasi luas wilayah Kabupaten Keerom menurut distrik dapat dilihat pada grafik berikut :

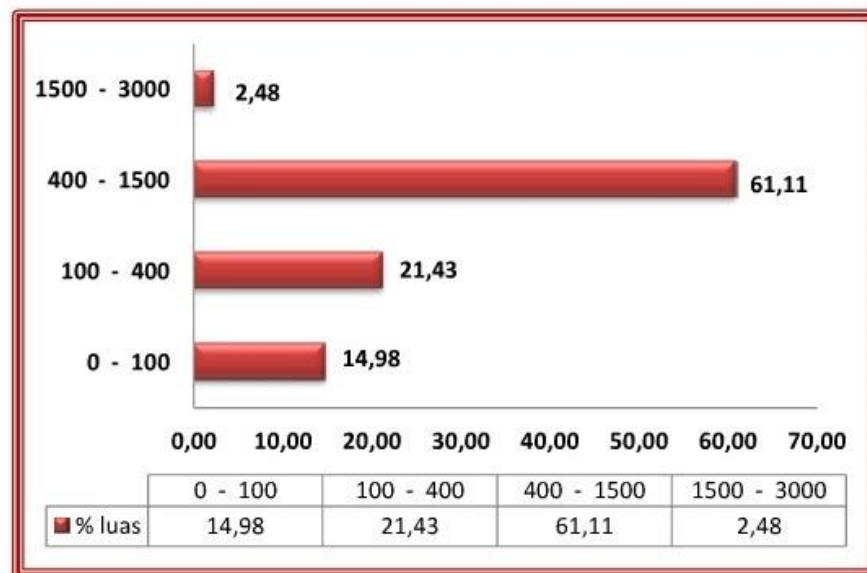
Luas wilayah seluruh Kabupaten Keerom 9.365 Km².

Persentase Luas Wilayah Kabupaten Keerom menurut Distrik
Percentage Area of Keerom Regency by District



Berdasarkan topografinya, Kabupaten Keerom memiliki ketinggian berkisar antara 0 sampai 3000 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Sebagian besar wilayah Kabupaten Keerom (5.722,96 km² atau 61,11 persen) berada pada ketinggian 400 - 1.500 Mdpl. Distrik Arso, Skanto, dan Arso Timur merupakan wilayah terendah yakni berkisar antara 0 – 1.000 Mdpl. Adanya wilayah dengan tinggi setara permukaan air laut ini menyebabkan pada beberapa lokasi di Kabupaten Keerom memiliki kemungkinan mengalami banjir. Kondisi ini terutama terjadi pada musim penghujan, di mana ketinggian yang sama dengan air laut mengakibatkan air tidak dapat dialirkan menuju laut lepas. Selain itu, Kabupaten Keerom juga memiliki kemiringan lahan yang beragam. Hamparan wilayah terluas berada dengan kemiringan mencapai lebih dari 40 derajat.

Luas Wilayah menurut Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut
Area of Keerom Regency by Altitude (%)



Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Keerom
 Source : National Land Board of Keerom Regency

Berdasarkan kondisi geografis wilayahnya, pendekatan pembangunan di Kabupaten Keerom dibagi dalam 3 wilayah, antara lain:

1. **Wilayah Pembangunan I** (Kawasan Perkotaan) :
 - a. Distrik Arso (transportasi darat), baik.
 - b. Distrik Skanto (transportasi darat), baik.

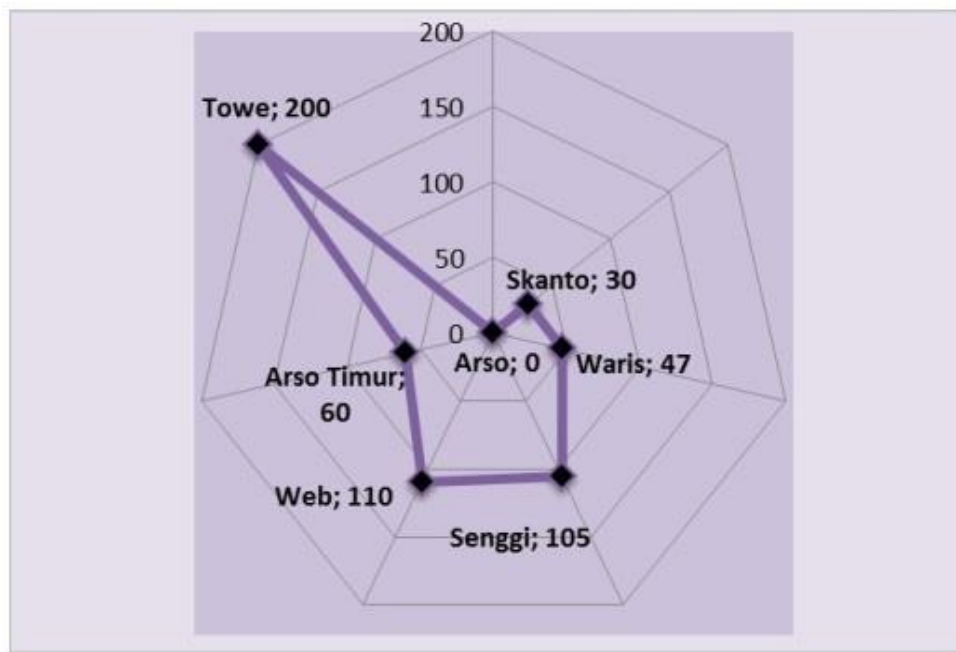
2. **Wilayah Pembangunan II** (Kawasan Penyangga) :
 - a. Distrik Arso Timur (transportasi darat), rusak ringan.
 - b. Distrik Waris (transportasi darat), rusak ringan.
 - c. Distrik Senggi (transportasi darat dan udara), rusak berat.
3. **Wilayah Pembangunan III** (Kawasan Terpencil, Tertinggal & Terisolir) :
 - a. Distrik Web (transportasi darat & udara), rusak berat
 - b. Distrik Towe (transportasi udara)

Distrik / District		Jarak/Distance (Km)	
(1)		(2)	
1.	Arso	0	Km
2.	Skanto	30	Km
3.	Waris	47	Km
4.	Senggi	105	Km
5.	Web	110	Km
6.	Arso Timur	60	Km
7.	Towe	200	Km

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Keerom

Source : Government Administration Division of Keerom Regency

Jarak dari Ibukota Distrik ke Ibukota Kabupaten (Km)
Distance from District Capital to Regency Capital



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Keerom
 Source : *Government Administration Division of Keerom Regency*

Berdasarkan Balai Meteorologi dan Geofisika Provinsi Papua, iklim Kabupaten Keerom pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan intensitas hujan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 tercatat jumlah curah hujan sebesar 1.919,5 mm dengan rata-rata 124 hari hujan. Pada 2012 tercatat rata-rata jumlah curah hujan meningkat menjadi 2.783,0 mm dengan 215 hari hujan.

Suhu udara di Kabupaten Keerom berkisar antara 24,8°C – 32,2°C dengan suhu rata-rata mencapai 27,8°C. Dengan kelembaban udara yang relatif tinggi, yakni sebesar 80,8 persen, intensitas penyinaran udara mencapai 45,9 persen dan tekanan udara sebesar 1.010,6 mbps.

Luas lahan yang berfungsi sebagai pemukiman penduduk hanya 686 Ha atau 0,08 persen dari total lahan bukan sawah berdasarkan data Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Keerom. Sedangkan luas lahan bukan sawah di kabupaten ini sebagian besar masih

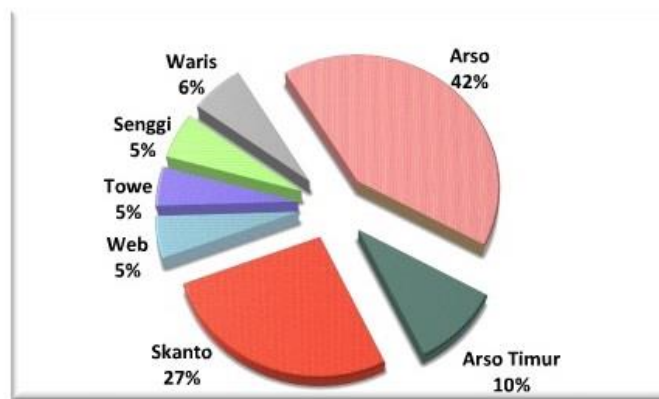
berfungsi sebagai hutan seluas 841.701 Ha atau 97,29 persen. Sisanya sebesar 16.405 Ha (1,90 %) dikelola sebagai perkebunan besar dan 4.056 Ha (0,47 %) sebagai pertanian lahan kering.

Sebagian besar area hutan di Kabupaten Keerom berfungsi sebagai hutan lindung dengan luas mencapai 329.370,09 Ha. Sedangkan luas hutan untuk produksi konversi sebesar 216.814,75 Ha. Jenis pemanfaatan hutan yang lain yakni sebagai hutan produksi terbatas, hutan lahan kering, HPPA, areal penggunaan lain.

Berdasarkan jenis tanahnya, secara umum jenis tanah di Kabupaten Keerom merupakan tanah podsolik. Tanah podsolik bersifat gembur sehingga sangat peka terhadap proses pengikisan. Tanah jenis ini juga memiliki tingkat keasaman yang tinggi sehingga untuk dapat difungsikan sebagai lahan pertanian dibutuhkan proses pemupukan dan pengawetan. Lahan dengan jenis podsolik di Kabupaten Keerom seluas 573.800 Ha (64,78 %) berupa podsolik merah kuning (PMK) dan tanah podsolik coklat kelabu seluas 246.400 Ha (27,82%).

Distribusi penduduk di Kabupaten Keerom menurut distrik pada tahun 2013:

Distribusi Penduduk di Kabupaten Keerom menurut Distrik, 2013
Population Distribution in Keerom Regency by District, 2013



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom
Source : BPS-Statistics of Keerom Regency

4. VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM

VISI

Menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Keerom yang cerdas, terampil, kompetitif, berkepribadian dan bermoral untuk mendukung pembangunan daerah.

MISI

1. **Meningkatkan mutu pendidikan.** Tujuannya *adalah* untuk mewujudkan mutu pendidikan pada semua jenjang yang selalu meningkat dan mampu berkompetisi secara global.
2. **Menciptakan masyarakat yang giat belajar dan mau bekerja keras.** Tujuannya *adalah* untuk menciptakan masyarakat yang giat belajar dalam meningkatkan pengetahuan dan *life skill*-nya.
3. **Menjadikan sekolah sebagai teladan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.** Tujuannya *adalah* untuk menciptakan kondisi sekolah yang nyaman dan dijadikan pusat informasi pengetahuan masyarakat.
4. **Membentuk manusia Papua Indonesia seutuhnya.** Tujuannya *adalah* untuk mewujudkan masyarakat Papua yang mandiri dan mampu berkompetisi di segala bidang.

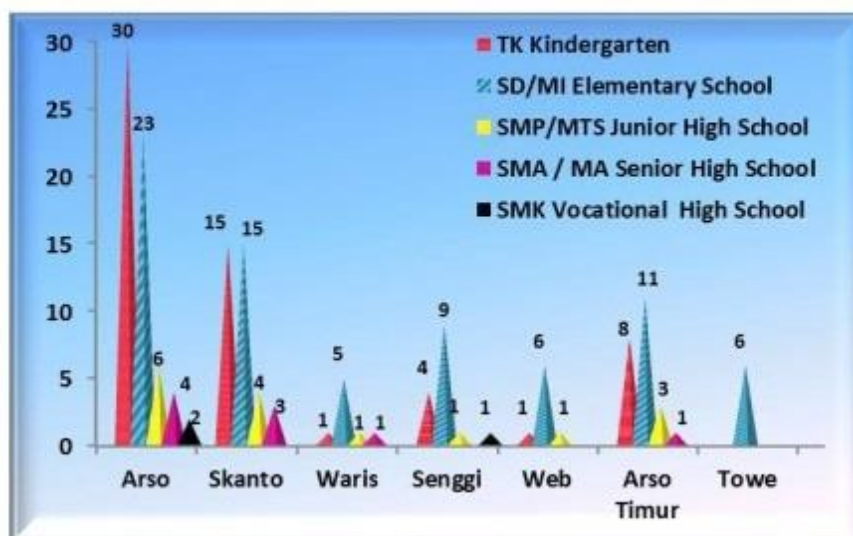
Data – data yang tersedia menunjukkan bahwa baik dari segi jumlah maupun rasio, pelayanan bidang pendidikan di Arso dan Skanto menduduki tempat tertinggi, disusul Arso Timur, Waris, Senggi, Web, Towe yang menduduki tempat terendah. Menariknya hal ini sejalan dengan komposisi penduduk Papua dan non – Papua. Arso – Skanto merupakan wilayah yang dominan masyarakat non – Papua (78% : 22%), Arso Timur relatif berimbang (47% : 53%); sementara distrik lain mayoritas orang asli Papua (hampir 100%).

Mari kita lihat jumlah sekolah di wilayah dominan penduduk Non – Papua (Arso – Skanto) dan wilayah dominan Orang Asli Papua (lima Distrik lain). Untuk Taman Kanak – kanak, 45 dari 59 (77%) TK di Kabupaten ini berada di Arso dan Skanto. Di Distrik Waris (Ibukota menurut Undang – undang) hanya ada 1 TK. Kemudian di Arso Timur 8 itu pun di tengah – tengah pemukiman transmigran. Sedangkan di tiga distrik yang lain : Web, Waris, dan

Towe yang hampir semua penduduknya Asli Papua hanya ada 1 TK dan bahkan tidak ada TK sama sekali.

Pola yang sama terjadi untuk pendidikan menengah. Untuk SMP/Ts, 10 dari 16 sekolah (63%) berada di Arso – Skanto. Untuk SMA, ada 7 di Arso – Skanto, 1 di Waris, 1 di Arso Timur sementara 3 distrik yang lain tidak ada SMA. Sekolah Menengah Kejuruan hanya di Arso dan Senggi. Sekolah Menengah Kejuruan di Arso walaupun disebut “SMK unggul untuk perbatasan”, sebenarnya sulit untuk diakses oleh orang asli Papua.

Banyaknya Sekolah menurut Distrik dan Tingkat Pendidikan, 2013
Number of Schools by Districts and Education Level, 2013



Sumber : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom
 Source : *Education Services of Keerom Regency*

Banyaknya SD di Kabupaten Keerom:

Distrik/ District	Sekolah/ School	Ruang Belajar/ Classroom	Guru/ Teacher	Murid/ Pupil	Rasio murid terhadap/ Pupil Ratio to		
					Sekolah/ School	Ruang Belajar/ Classroom	Guru/ Teacher
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Arso	19	118	179	2 641	139	22	15
2. Skanto	13	76	149	1 563	120	21	11
3. Waris	2	12	8	141	70	12	18
4. Senggi	6	40	30	265	44	7	9
5. Web	2	11	11	150	75	14	14
6. Arso Timur	6	41	50	666	111	16	13
7. Towe	6	25	16	866	144	35	54
Jumlah/ 2013	54	323	443	6 292	116	19	14
Total 2012	58	290	540	6 887	119	24	13
2011	58	299	494	6 949	120	23	14
2010	56	326	550	6 725	120	21	12
2009	58	299	494	6 949	120	23	14
2008	45	246	508	5 949	132	24	12
2007	44	241	497	5 995	136	25	12
2006	40	239	405	5 119	128	21	12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom

Banyaknya SMP di Kabupaten Keerom:

Distrik/ District	Sekolah/ School	Ruang Belajar/ Classroom	Guru/ Teacher	Murid/ Pupil	Rasio murid terhadap/ Pupil Ratio to		
					Sekolah/ School	Ruang Belajar/ Classroom	Guru/ Teacher
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Arso	6	49	107	1 234	206	25	12
2. Skanto	4	32	72	786	197	24	11
3. Waris	1	3	9	85	85	28	9
4. Senggi	1	6	13	160	160	27	12
5. Web	1	9	18	183	183	20	10
6. Arso Timur	3	14	41	265	88	19	7
7. Towe	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah/ 2013	16	113	260	2 713	170	24	10
Total 2012	15	94	264	2 549	170	27	10
2011	15	84	257	2 487	166	31	10
2010	13	90	257	2 311	181	26	9
2009	13	80	250	2 439	188	30	10
2008	14	75	257	2 125	152	28	8
2007	12	67	221	2 242	187	33	10
2006	11	49	181	1 956	178	40	11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom

Jumlah SMA di kabupaten Keerom:

Distrik/ <i>District</i>	Sekolah/ <i>School</i>	Ruang Belajar/ <i>Classroom</i>	G u r u/ <i>Teacher</i>	Murid/ <i>Pupil</i>	Rasio murid terhadap/ <i>Pupil Ratio to</i>		
					Sekolah/ <i>School</i>	Ruang Belajar/ <i>Classroom</i>	Guru/ <i>Teacher</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Arso	3	36	68	930	310	26	14
2. Skanto	3	25	61	504	168	20	8
3. Waris	1	8	19	61	61	8	3
4. Senggi	0	0	0	0	0	0	0
5. Web	0	0	0	0	0	0	0
6. Arso Timur	1	3	19	112	112	37	6
7. Towe	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah/ 2013	8	72	167	1 607	189	22	10
Total 2012	8	54	164	1 468	184	27	9
2011	7	53	197	1 629	233	31	8
2010	6	54	143	1 528	255	28	11
2009	6	53	197	1 629	233	31	8
2008	6	48	169	1 404	234	29	8
2007	6	42	115	1 344	224	32	12
2006	5	33	91	1 006	201	30	11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom

Banyaknya SMK di Kabupaten Keerom:

Distrik/ District	Sekolah/ School	Ruang Belajar/ Classroom	Guru/ Teacher	Murid/ Pupil	Rasio murid terhadap/ Pupil Ratio to		
					Sekolah/ School	Ruang Belajar/ Classroom	Guru/ Teacher
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Arso	1	17	33	222	222	13	7
2. Skanto	0	0	0	0	0	0	0
3. Waris	0	0	0	0	0	0	0
4. Senggi	1	3	18	101	101	34	6
5. Web	0	0	0	0	0	0	0
6. Arso Timur	0	0	0	0	0	0	0
7. Towe	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah/ 2013	2	20	51	323	162	16	6
Total 2012	2	11	64	356	178	32	6
2011	2	16	37	291	146	18	8
2010	2	11	38	256	128	23	7
2009	1	14	24	217	217	19	9
2008	1	8	24	196	196	25	8
2007	1	4	11	93	93	23	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom

Data data diatas dapat diambil kesimpulan :

1. Akses terhadap pelayanan pendidikan tidak merata menurut irisan suku. Ada kesenjangan yang besar di mana Orang Papua memiliki akses yang lebih kecil terhadap pelayanan pendidikan dibanding orang non – Papua.
2. Pendidikan usia dini (TK) sangat minim bahkan sama sekali tidak ada di lima distrik lain di luar wilayah transmigrasi dan ibukota. Sementara itu jumlah TK di Arso dan Skanto cukup banyak 45 TK. Jadi, sementara anak – anak di Arso dan Skanto dapat

memilih satu diantara 45 sekolah yang ada, anak – anak Papua di 5 distrik lain tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan TK.

3. Sekolah Dasar relatif tersedia, walaupun kualitasnya rendah seperti terlihat dari rasio murid guru dan rasio murid ruang kelas, serta dari kenyataan bahwa seering kali guru tidak ada di sekolah walaupun ada dalam angka dan perhitungan gaji. Karena akses informasi dan ekonomi, menyebabkan guru – guru kurang kerasan tinggal di pedalaman. Tetapi kalau waktunya terima tunjangan mereka berbondong – bondong ke kota. Karena segala urusan administrasi Kepegawaian mereka di kota. Hal ini menjadi alasan kuat mereka untuk meninggalkan anak – anak terlantar sendirian di sekolah.
4. Karena kurang tersedianya SMP dan SMA di masing – masing distrik, maka untuk menempuh pendidikan lebih lanjut, orang Asli Papua harus berpindah tempat ke kota. Perpindahan ini memiliki konsekuensi dari segi ekonomi, budaya, dan dari segi tempat tinggal. Tinggal dengan siapa? Siapa yang mendampingi? Harus pisah dengan keluarga bagaimana dengan biayanya? Bagaimana keamanan mereka? Mudahkah mereka beradaptasi dengan kehidupan kota Arso, yang 78% penduduknya berasal dari beragam suku yang berbeda dengan mereka? Semua hal ini yang tidak perlu dialami oleh orang non Papua di Arso dan Skanto yang memiliki akses lebih mudah. Selama ini hidup mereka meramu, mencari makan kalau mereka lapar. Mereka akan pergi berburu untuk memperoleh daging, akan ke kebun mencabut ubi dan petik sayur. Akan tetapi di kota semua serba beli. Tidak ada yang bisa diperoleh dengan gratis. Selama ini mereka di pedalaman tinggal di rumah – rumah yang sederhana, kalau di kota mereka akan tinggal di rumah saudara, asrama yang disediakan oleh pemerintah maupun gereja setempat. Hidup teratur menjadi tantangan besar untuk mereka. Aturan hidup bersama sering kali tidak dimengerti oleh mereka. Ketika di pedalaman belum ada daya saing dalam meraih prestasi, namun di sini anak ditantang untuk berprestasi. Di sekolah – sekolah Negeri di Arso, hanya ada sedikit orang Papua. Secara akademik kadang anak Papua tertinggal. Tapi dari psikomotorik pada bidang – bidang olahraga mereka patut diacungi jempol.
5. Dalam jangka panjang masalah pendidikan memiliki konsekuensi yang luar biasa. Kalau pendidikan dasar (SD dan SMP) tidak dapat diakses dengan baik oleh orang

Asli Papua, bagaimana mengharapkan mereka bisa masuk SMA dan perguruan tinggi? Sementara itu orang non Papua dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik, dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini kemudian akan berpengaruh terhadap pekerjaan, kualitas sumber daya profesional, serta penguasaan kedudukan publik dan jabatan strategis. Kendati ada kuota, misalnya untuk tes masuk perguruan tinggi negeri atau pegawai negeri sipil, anak – anak asli Papua yang tidak mendapatkan hak pendidikan dasar yang berkualitas, akan tetap sulit bersaing. Faktor ini juga yang dapat menjelaskan tingkat pengangguran di kalangan usia kerja produktif Papua.

6. Singkatnya, pola pelayanan pendidikan di Keerom mengeksklusi orang Papua. Dan eksklusivitas bidang pendidikan itu dalam jangka waktu panjang akan menciptakan eksklusivitas yang lebih besar dan berkelanjutan, seperti dalam pekerjaan dan pendudukan jabatan publik.

Keberadaan para Suster SSpS dan Pater SVD di Papua mencoba menjawab kebutuhan ini. Para Suster SSpS dan Pater SVD ditugaskan di semua distrik di kabupaten Keerom kecuali di distrik Senggi, karena mayoritas mereka beragama Kristen. Para suster tinggal di Kalibom, di sini dibangun 2 unit asrama, dan di tengah – tengahnya ada bangunan untuk para suster yang pada rencana semula pengelolaan diserahkan kepada para suster. Gambarnya adalah sebagai berikut:



Bulan Oktober tahun 2012 para suster menempati bangunan ini. Program pendidikan berpola asrama ini adalah program dari Bupati Celsius Watae. Namun ketika pada pemilihan

Bupati baru beliau tidak terpilih lagi lagi maka program ini menjadi terbengkalai. Karena ketika beliau tidak menjabat lagi sebagai Bupati pembangunan asrama sudah dimulai. Anak – anak tinggal di asrama ketika mereka mau Ujian Nasional, karena jarak rumah mereka yang jauh dari sekolah. Posisi asrama ini di wilayah SMA Negeri 3 Waris.

Yang sangat disayangkan adalah dengan dibangunnya sarana umum yang begitu megah tapi kurang diurus baik dalam pengelolaannya. Sekarang bangunan itu berdiri megah dan tanpa terurus, jadi rumah kosong, resikonya kadang disalahgunakan. Dan sangat disayangkan, salah satu akibatnya adalah ada anak yang masih SMP dihamili oleh kakak kelasnya. Satu hal yang sangat memukul waktu itu ada ketika mama yang jadi orang tua anak perempuan itu telepon saya, “Coba suster ada disini, anak – anak tidak akan liar seperti ini”. Memang menyayat situasi ini.

Akses untuk ke perguruan tinggi bagi anak – anak pedalaman ada Unit Percepatan Pembangunan Papua – Papua Barat (UP4B), bagi anak – anak Asli Papua akan diberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Biaya semua ditanggung oleh pemerintah. Kebetulan waktu itu saya sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum saya mengusahakan anak – anak saya untuk mendapatkan. Dan akhirnya ada 4 orang yang lolos. Satu orang di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Ekonomi, satu orang di Universitas Cendrawasih Papua jurusan kedokteran, dua orang di Universitas Negeri padang jurusan holtikultura. Sebenarnya banyak akses untuk membantu mereka di bidang pendidikan. Namun kadang guru – guru tidak bisa menangkap peluang itu. Karena jarak yang jauh dari pusat dinas Pendidikan dan pengajaran, hal ini menjadikan informasi yang datang ke sekolah menjadi terlambat.

Orang – orang yang sudah dewasa kadang juga belum bisa membaca dan menulis. Doa – doa dasar juga belum bisa. Untunglah ada bantuan dari dinas Pendidikan Luar Sekolah untuk mereka. Saya bekerjasama dengan guru SD dan tentara mengumpulkan mama – mama dan bapak – bapak yang mau belajar untuk datang berkumpul di balai desa atau sekolah untuk belajar membaca, menulis dan berdoa. Sangat mengharukan saat mereka begitu serius belajar. Kadang hati sebagai seorang guru teriris, mereka adalah korban – korban dari para guru yang tidak setia mendampingi mereka. Mereka seperti ini bukan kesalahan mereka. Dengan sebisanya mungkin mereka berusaha untuk mengeja huruf demi huruf yang ada. Pada gambar inilah sebagian dari mereka yang kurang beruntung, mereka belum mengenyam pendidikan yang layak.



Akibat dari pendidikan Orang Asli Papua yang terbatas, saat penerimaan PNS selalu ada masalah karena orang asli Papua hanya sedikit yang diterima. Kalau pun ada yang diterima, selalu sifatnya yang lama tidak bisa berubah, di antaranya minum mabuk.

Pendidikan adalah wahana untuk mendidik manusia menjadi lebih baik. Kerjasama yang baik antara adat, gereja dan pemerintah adalah kunci utama untuk mengentaskan orang asli Papua dari keterpurukannya.

Karena sampai 4 tahun belum ada MOU untuk SSpS mengelola asrama, maka pada tanggal 15 Juli 2013 para suster SSpS meninggalkan Kalibom. Sedih memang meninggalkan mereka dalam kondisi seperti itu. Hati nurani sebagai seorang guru berontak, tapi karena ketaatan pada pemimpin membuat saya pun tidak bisa berbuat banyak.

Satu hal yang membuat saya bahagia adalah para saudara SVD masih tetap tinggal di sana. Saya yakin semangat yang sama yang diwariskan oleh Bapak Arnoldus di hati putra putrinya tetap akan hidup dalam pengabdianya untuk orang Papua.

KOPASUS KRISTUS

Kulitmu jadi legam dibakar matahari
Diguyur hujan langit papua
Kakimu disucikan

Oleh lumpur tanah rawa
Ketika engkau menempuh hutan rimba
Mengunjungi umat tuhan yg terlupa
Dalam engkau aku berbangga
Punya saudara anggota Serikat Sabda Allah
dalam dirimu aku bersyukur punya saudari misionaris Abdi Roh Kudus
(*Pater Leo Kleden SVD, Provinsial SVD Ende*)

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Keerom dalam Angka (2014)
Dale, Cypri J. P & Djonga, John (2011), *Paradoks Papua: Pola – pola Ketidakadilan Sosial, Pelanggarn Hak Atas Pembangunan dan Kegagalan Kebijakan Afirmatif, dengan Fokus di Kabupaten Keerom.*
Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah.*

"Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika dia berdiri dan memberi perintah. Kebesaran seseorang akan terlihat ketika dia berdiri sama tinggi dengan orang lain, dan membantu orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari dirimereka untuk mencapai sukses"

-Prof. G. Arthur Keough

&&&&&

***Sr. Viani, SSpS:** Guru SMK Mater Amabilis di Surabaya dan mantan guru di Kabupaten Keerom, Papua, Indonesia.